

## Membedah Demokrasi: Tantangan, Implikasi Terhadap Kualitas, dan Harapan untuk Masa Depan

St. Hadijah Wahid <sup>1</sup>, Nurul Amelia <sup>2</sup>, Misra Miranda <sup>3</sup>, Ashari <sup>4</sup>, Agustina <sup>5</sup>, Asriani Lestari <sup>6</sup>, Ari Sandi <sup>7</sup>

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima 22, 01, 2025  
Disetujui 23, 01, 2025  
Diterbitkan 24, 01, 2025

#### Katakunci:

Katakunci Pertama;  
Katakunci Kedua;  
Katakunci Ketiga;  
Katakunci Keempat.

### ABSTRACT

#### Abstrac

*This article discusses challenges and expectations for Indonesian democracy, with an emphasis on several issues that affect the quality of the democratic system. The main characteristics that are identified include corruption, social and economic determinants, human rights violations, radicalism, the use of kebebasan berpendapat, political pragmatism, and a lack of access to information. As a result of these tantangan-tantangan, the political environment is not healthy, with oligarchy and economic politics limiting public participation and akuntabilitas. Despite this, there is a need to improve through increased transparency and accountability, independence for the peradilan, legal and political reform, and political education for the next generation. Human rights protection and sipil kebebasan also serve as a foundation for encouraging public participation in political processes. This article highlights the importance of cooperation between the government, the Sipil populace, and various other relevant parties in order to create a more robust and inclusive democracy in Indonesia.*

**Kata kunci:** Deliberative Democracy, Challenges, Legal Reform

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### Penulis Korespondensi:

Nurul Amelia  
Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia  
Email: [amelianurul516@gmail.com](mailto:amelianurul516@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang banyak dianut di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Secara umum, demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan arah negara melalui pemilihan umum dan partisipasi politik. Namun, meskipun demokrasi menjanjikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan demokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia, seringkali menghadapi tantangan besar yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan kritis mengenai demokrasi, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi, serta implikasi dan harapan ke depan.

Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang memberi suara kepada rakyat untuk menentukan arah kebijakan dan memilih pemimpin, telah berkembang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan politik modern. Konsep demokrasi pertama kali diperkenalkan di Yunani Kuno, yang dikenal dengan sebutan demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam perkembangannya, demokrasi modern lebih mengarah pada sistem perwakilan, di mana rakyat memilih wakil yang akan membuat keputusan atas nama mereka. Meskipun demikian, esensi dari demokrasi tetap terletak pada prinsip kedaulatan rakyat dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks demokrasi, berbagai teori politik telah berkembang, memberikan pandangan berbeda mengenai bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan. Salah satu teori yang paling dikenal adalah teori *pluralisme* yang dikemukakan oleh Robert Dahl. Menurut teori ini, demokrasi berfungsi dengan baik ketika berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi keputusan politik. Pluralisme menganggap bahwa tidak ada satu kelompok pun yang memiliki kekuasaan mutlak, dan semua kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sebaliknya, teori *elitisme* yang dikemukakan oleh C. Wright Mills menyoroti fakta bahwa meskipun secara formal ada pemilu dan sistem demokratis lainnya, pada kenyataannya kekuasaan seringkali terpusat pada sekelompok elit yang mengendalikan kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis demokrasi memberi peluang kepada rakyat, dalam praktiknya, akses dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sering kali dibatasi oleh struktur kekuasaan yang ada. Selain itu, teori *demokrasi deliberatif* yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas menekankan pentingnya dialog dan diskusi publik sebagai elemen kunci dalam demokrasi. Demokrasi deliberatif berfokus pada pembentukan opini publik yang rasional dan inklusif melalui proses diskusi yang terbuka dan partisipatif. Dalam hal ini, kualitas demokrasi diukur bukan hanya dari hasil pemilu, tetapi juga dari proses komunikasi antara rakyat dan negara yang membentuk keputusan bersama.

Demokrasi juga diatur oleh berbagai aturan dan prinsip yang mendasari fungsinya. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah *hak asasi manusia* yang mengatur kebebasan berbicara, hak memilih, dan hak untuk dipilih. Prinsip lainnya adalah *kebebasan pers*, yang memungkinkan media untuk berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan menyuarakan kepentingan rakyat. Selain itu, ada pula *pemisahan kekuasaan* yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak ada satu institusi yang terlalu dominan dalam sistem politik. Namun, meskipun demokrasi telah memiliki berbagai landasan teori dan aturan yang kuat, tantangan dalam implementasinya sering kali muncul. Dari manipulasi opini publik, politik identitas, hingga kesenjangan sosial-ekonomi yang memperburuk kualitas partisipasi politik. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan mencari solusi agar demokrasi dapat berkembang dan memenuhi harapan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini, implikasinya terhadap kualitas demokrasi, serta harapan untuk perbaikan

sistem demokrasi di masa depan.

## METODE PELAKSANAAN

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dengan pendekatan *Literature Review* (kajian literatur) untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai cara data diperoleh dan dianalisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada literatur yang kredibel. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan mendalam mengenai topik yang dibahas, sehingga relevansi dengan permasalahan penelitian dapat teridentifikasi dengan baik. Teknik analisis yang digunakan menekankan pada analisis deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang ada, dengan data yang telah dikaji, sehingga memberikan pemahaman secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tantangan Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang mengelola negara melalui perwakilan atau secara langsung. Konsep ini berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dalam prakteknya, demokrasi memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik melalui mekanisme pemilu, kebebasan berbicara, serta hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, meskipun demokrasi memberikan banyak keuntungan dalam hal kebebasan dan partisipasi politik, implementasinya tidak selalu berjalan mulus (Lismanto *et al.*, n.d.). Demokrasi sering kali menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan, dominasi oleh kelompok tertentu, dan manipulasi publik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap praktik demokrasi sangat penting untuk menjaga kualitasnya. Dalam konteks ini, tantangan demokrasi mencakup berbagai isu seperti *political apathy* (ketidakpedulian politik) di kalangan warga negara, ketidakseimbangan kekuatan antara elit politik dan rakyat, serta adanya ancaman terhadap kebebasan pers dan hak-hak sipil. Pemahaman yang lebih dalam tentang demokrasi, serta tantangan-tantangan yang dihadapinya, akan membantu mengidentifikasi langkah-langkah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri (Harefa & Hulu, 2020).

### *Ketidaksetaraan Akses Terhadap Kekuasaan*

Ketidaksetaraan Akses Terhadap Kekuasaan merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem demokrasi yang dapat merusak kualitas dan integritasnya. Dalam sebuah sistem demokrasi yang ideal, semua warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik itu melalui pemilu, pemilihan perwakilan, atau pengaruh terhadap kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan seringkali terjadi, di mana hanya sebagian kelompok atau individu tertentu yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memengaruhi keputusan-keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi, di mana kelompok-kelompok yang kaya atau memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya finansial seringkali lebih mudah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka bisa mendanai

kampanye politik, memiliki lobi yang kuat di pemerintah, atau memanfaatkan media untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sementara itu, kelompok yang lebih miskin atau kurang mampu sering kali kesulitan untuk ikut berpartisipasi dalam politik, baik karena kurangnya akses informasi, kurangnya sumber daya untuk kampanye politik, atau ketidakmampuan untuk mengorganisasi suara mereka secara efektif (Gender & 2015, n.d.; Ulfiyyati *et al.*, n.d.).

Selain itu, struktur politik yang elit juga memperburuk ketidaksetaraan ini. Dalam banyak kasus, meskipun ada mekanisme pemilihan umum yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin, praktik politik di banyak negara sering kali mengarah pada dominasi oleh elit politik yang memiliki kendali atas proses pengambilan keputusan. Politisi atau partai politik yang sudah mapan sering kali dapat mengatur ulang sistem agar kepentingan mereka tetap terjaga, sementara rakyat kecil atau kelompok-kelompok marjinal tidak memiliki cukup ruang untuk bersuara. Dalam konteks ini, meskipun demokrasi memberi kesempatan untuk memilih pemimpin, kenyataannya pengaruh rakyat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat terbatas.

Ketidaksetaraan dalam pendidikan dan informasi juga memainkan peran penting dalam ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan. Warga negara yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau akses lebih baik terhadap informasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses politik dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kebijakan. Sebaliknya, masyarakat yang terpinggirkan atau yang kurang mendapat akses terhadap pendidikan yang memadai sering kali kesulitan untuk terlibat dalam diskursus politik atau bahkan dalam pemilihan umum itu sendiri (Afif *et al.*, n.d.). Hal ini memperburuk ketidaksetaraan, karena hanya kelompok yang lebih terdidik dan lebih informasional yang dapat berperan aktif dalam proses demokrasi. Di sisi lain, politik identitas juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses kekuasaan. Di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, agama, atau ras, kelompok tertentu sering kali merasa terpinggirkan dalam proses politik karena identitas mereka tidak diakui atau dihargai oleh penguasa yang dominan. Dalam situasi seperti ini, meskipun secara teori semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu atau mengambil bagian dalam pemerintahan, kenyataannya sebagian kelompok mungkin tidak memiliki akses yang setara untuk mendapatkan posisi politik atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan (Ilmiah dalam Bidang Pendidikan STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi *et al.*, n.d.).

Ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan ini tidak hanya membatasi suara rakyat, tetapi juga dapat merusak legitimasi demokrasi itu sendiri. Jika mayoritas rakyat merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang setara terhadap kekuasaan atau bahwa keputusan-keputusan politik didorong oleh kepentingan segelintir orang, maka kepercayaan terhadap sistem demokrasi akan berkurang. Akibatnya, partisipasi politik akan menurun, protes dan ketidakpuasan akan meningkat, dan sistem demokrasi bisa terancam oleh apatisisme politik atau bahkan radikalisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas demokrasi, penting untuk memastikan bahwa akses terhadap kekuasaan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat secara setara, tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau identitas lainnya.

### ***Dominasi oleh Kelompok Tertentu***

Dominasi oleh Kelompok Tertentu merupakan salah satu tantangan utama yang dapat mengancam prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan yang berbasis pada suara dan kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang ideal, seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Namun, dalam banyak kasus, kekuasaan politik dan pengaruh dalam pembuatan kebijakan cenderung terakumulasi di tangan kelompok tertentu, baik itu kelompok elit, partai politik dominan, atau bahkan kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki sumber daya dan jaringan yang kuat. Dominasi seperti ini

dapat merusak kualitas demokrasi, mengurangi representasi yang adil, dan mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat (Winarno, 2007).

Salah satu bentuk dominasi yang paling jelas adalah (**elitisme politik**), di mana kekuasaan terpusat pada segelintir orang atau kelompok yang memiliki kontrol atas partai politik, lembaga legislatif, eksekutif, atau bahkan media massa. Kelompok elit ini sering kali memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya politik dan ekonomi, sehingga mereka bisa menentukan arah kebijakan negara yang lebih menguntungkan bagi mereka sendiri. Sebagai contoh, politisi atau pemimpin yang terhubung dengan kelompok bisnis besar atau keluarga-keluarga kaya bisa menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk memengaruhi keputusan politik, merancang kebijakan yang mendukung kepentingan mereka, dan mempertahankan posisi kekuasaan mereka (Abdurrahman, 2003; Winarno, 2016). Hal ini mengarah pada ketimpangan dalam representasi, karena kebijakan yang dibuat lebih mencerminkan kepentingan kelompok elit daripada kepentingan rakyat banyak.

Kelompok kepentingan atau lobi (**Interest Groups**) juga berperan dalam dominasi politik. Kelompok-kelompok ini, yang seringkali terdiri dari perusahaan besar, serikat pekerja, atau organisasi non-pemerintah, memiliki tujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah demi keuntungan kelompok mereka. Kelompok dengan sumber daya yang besar bisa lebih efektif dalam memobilisasi dukungan, melakukan kampanye lobi, atau mendanai kampanye politik untuk mendukung kandidat yang berpihak pada kepentingan mereka. Dalam beberapa kasus, dominasi kelompok kepentingan ini dapat menciptakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum atau bahkan merugikan sebagian besar warga negara (Faulks, 2019). Misalnya, kebijakan ekonomi atau perpajakan yang lebih menguntungkan bagi korporasi besar, sementara mengabaikan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Dominasi juga bisa terjadi melalui (**kontrol atas media dan informasi**). Media massa yang tidak bebas atau yang dikendalikan oleh kelompok tertentu dapat menjadi alat untuk memperkuat pengaruh mereka dalam politik. Ketika sejumlah besar media berada di tangan beberapa pemilik yang sama, mereka dapat membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan mereka, menyebarkan informasi yang berpihak, atau bahkan menutup-nutupi fakta-fakta yang tidak sesuai dengan agenda mereka. Penggunaan media untuk kepentingan politik atau ekonomi kelompok tertentu ini mengurangi keberagaman informasi dan opini, serta menghambat masyarakat untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional dalam proses politik (Jones, 2015).

Di banyak negara, (**Politik uang**) menjadi masalah besar dalam praktik demokrasi. Dalam sistem pemilu yang kompetitif, kandidat yang memiliki akses besar terhadap dana kampanye sering kali lebih memiliki peluang untuk memenangkan pemilu. Kelompok atau individu yang kaya, atau perusahaan yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu, dapat mendanai kampanye kandidat yang mereka dukung dan mempengaruhi hasil pemilu (Bahasa Arab Klp, n.d.; Nuna et al., 2019). Dengan demikian, hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang cukup yang dapat bersaing secara efektif dalam sistem demokrasi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam proses politik, di mana suara rakyat tidak lagi menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan pemimpin (Di Banyak Negara, (*Politik Uang*) Menjadi Masalah... - Google Scholar, n.d.).

Dalam beberapa kasus, dominasi oleh kelompok tertentu juga dapat terlihat pada tingkat (**Partai politik mayoritas**) yang mengendalikan proses legislatif dan eksekutif. Partai yang menguasai sistem politik sering kali cenderung melaksanakan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi anggotanya, tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok oposisi atau minoritas. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, di mana

kebijakan negara tidak mencerminkan keberagaman pendapat dan kepentingan yang ada di masyarakat. Dominasi semacam ini dapat mempengaruhi sistem checks and balances dalam pemerintahan, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Tanpa adanya keseimbangan kekuasaan, kebijakan yang diambil bisa lebih berpihak pada kelompok dominan daripada rakyat secara keseluruhan.

Selain dominasi politik oleh kelompok-kelompok elit atau kepentingan tertentu, **(Diskriminasi terhadap kelompok minoritas)** juga merupakan bentuk dominasi dalam demokrasi yang seringkali terabaikan. Kelompok-kelompok dengan identitas etnis, agama, ras, atau gender tertentu sering kali tidak mendapatkan representasi yang adil dalam pemerintahan. Bahkan jika mereka memiliki hak suara yang sama, kebijakan yang diambil oleh kelompok dominan sering kali mengabaikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan dalam masyarakat, karena kebijakan tidak mencerminkan pluralitas dan keberagaman yang seharusnya ada dalam sebuah sistem demokrasi (Masyarakat et al., n.d.; Policy & 2018, 2018).

Dominasi oleh kelompok tertentu memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi. Ketika kekuasaan politik terpusat di tangan segelintir orang atau kelompok, rakyat biasa sering merasa terasingkan dari proses politik dan tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam pembuatan kebijakan. Ini dapat menyebabkan apatisme politik, penurunan partisipasi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri (Sosiologi & 2021, n.d.). Jika masyarakat merasa bahwa proses politik hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka legitimasi sistem demokrasi akan terganggu, dan potensi terjadinya ketegangan sosial atau bahkan krisis politik menjadi semakin besar. Lebih jauh lagi, dominasi oleh kelompok tertentu mengurangi pluralisme politik—di mana berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat seharusnya dihargai dan dipertimbangkan. Jika hanya satu kelompok atau segelintir individu yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan, maka kebijakan tersebut cenderung menjadi sempit dan tidak inklusif. Sebagai contoh, kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok minoritas atau masyarakat miskin akan semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Science & 2017, 2017).

### ***Manipulasi Publik oleh Pihak-Pihak yang Memiliki Kepentingan Tertentu***

Manipulasi Publik oleh Pihak-Pihak yang Memiliki Kepentingan Tertentu merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem demokrasi yang dapat merusak integritas proses politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem itu sendiri. Dalam demokrasi, salah satu prinsip utamanya adalah partisipasi rakyat yang informasional dan rasional dalam pengambilan keputusan politik, yang didasarkan pada informasi yang akurat dan transparan. Namun, manipulasi publik baik melalui media, kampanye politik, atau penyebaran informasi palsu dapat menggiring opini publik ke arah yang salah dan mengaburkan kebenaran. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat demi keuntungan politik atau ekonomi kelompok atau individu tertentu (Kirana et al., n.d.; Pramessella et al., n.d.).

Salah satu bentuk manipulasi publik yang paling signifikan adalah penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Dalam era digital saat ini, berita palsu bisa menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan platform online, mempengaruhi opini publik dalam waktu singkat. Informasi yang tidak akurat atau sengaja dipelintir dapat digunakan untuk menyesatkan masyarakat, menciptakan ketegangan politik, atau merusak reputasi lawan politik. Misalnya, selama pemilu atau krisis politik, kelompok dengan kepentingan tertentu mungkin akan sengaja menyebarkan hoaks yang mendiskreditkan calon tertentu atau menyalahartikan kebijakan yang diusulkan oleh pihak lawan untuk menggiring opini publik ke arah yang menguntungkan mereka. Penelitian menunjukkan



bahwa informasi yang tidak benar atau manipulatif sering kali lebih cepat menyebar daripada informasi yang benar, karena berita sensasional atau emosional lebih menarik perhatian. Ini membuat masyarakat lebih rentan terhadap manipulasi, dan pada gilirannya, mengurangi kualitas pengambilan keputusan politik mereka. Ketika pemilih atau masyarakat luas tidak dapat membedakan antara fakta dan fiksi, maka pilihan politik mereka menjadi tidak didasarkan pada pemahaman yang jernih dan rasional.

Penggunaan media massa untuk memanipulasi opini publik juga menjadi tantangan besar dalam demokrasi. Media, baik itu televisi, surat kabar, atau media digital, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik dan sosial. Kelompok yang memiliki kontrol atas media, baik itu individu atau perusahaan besar, bisa mengarahkan narasi media untuk mendukung kepentingan politik atau ekonomi mereka (Politik & 2025, n.d.). Misalnya, media yang dikuasai oleh kelompok tertentu bisa menyoroti isu-isu yang menguntungkan mereka sambil mengecilkan atau mengabaikan isu-isu yang tidak sesuai dengan agenda mereka. Selain itu, media juga dapat dipolitisasi untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu dalam pemilu. Dengan memberikan pemberitaan yang bias atau satu sisi, media bisa memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon atau kebijakan tertentu, meskipun pada kenyataannya kebijakan tersebut mungkin tidak dalam kepentingan publik (Komunikasi & 2018, n.d.; Nuraliza *et al.*, 2024). Misalnya, media yang terlalu mendukung kebijakan pemerintah atau calon tertentu tanpa kritik yang memadai dapat menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut lebih populer atau lebih efektif dari yang sebenarnya, dan ini bisa menyesatkan pemilih.

Pihak-pihak dengan kepentingan tertentu sering kali memanfaatkan **manipulasi emosi dan ketakutan** untuk membentuk opini publik. Dalam konteks politik, strategi ini disebut sebagai "politik ketakutan" (fear-mongering), di mana kelompok tertentu berusaha untuk menciptakan rasa takut atau kecemasan di kalangan rakyat, sehingga mereka lebih mudah dipengaruhi untuk mendukung kebijakan atau kandidat tertentu. Misalnya, politisi atau kelompok dengan kepentingan tertentu bisa menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman dari luar (seperti terorisme, imigrasi ilegal, atau krisis ekonomi), dan kemudian menawarkan solusi yang hanya menguntungkan mereka atau memperkuat kontrol mereka atas kekuasaan. Manipulasi ketakutan ini juga bisa melibatkan penyebaran stereotip negatif terhadap kelompok tertentu (seperti etnis, agama, atau kelas sosial tertentu) untuk menciptakan polarisasi dan memecah belah masyarakat. Ketika orang-orang merasa terancam, mereka lebih cenderung mencari perlindungan dalam pemimpin yang menjanjikan solusi cepat, meskipun solusi tersebut mungkin merugikan kepentingan jangka panjang mereka (Akbar *et al.*, 2021; Youna Bachtiar *et al.*, 2016).

**Kampanye negatif** atau **black PR** (public relations hitam) adalah bentuk lain dari manipulasi publik yang sering digunakan dalam pemilu atau perebutan kekuasaan politik. Dalam kampanye negatif, pihak tertentu akan menyerang reputasi lawan politik dengan cara yang tidak jujur atau menyebarkan fitnah untuk merusak citra mereka. Ini bisa berupa penyebaran informasi yang tidak benar, penggambaran lawan politik sebagai orang yang tidak kompeten atau korup, atau bahkan menggunakan taktik-taktik pribadi untuk menyerang karakter seseorang. Penyebaran kampanye negatif tidak hanya merusak reputasi individu atau kelompok, tetapi juga menurunkan kualitas diskursus politik. Alih-alih fokus pada isu-isu substantif dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, kampanye semacam ini mengalihkan perhatian publik ke hal-hal yang tidak relevan dan memperburuk polarisasi sosial (Aliawati, n.d.; Gunawan & Ratmono, 2021). Dalam jangka panjang, taktik manipulatif seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan merusak integritas demokrasi itu sendiri.

Manipulasi publik juga dapat terjadi melalui **penentuan agenda** atau **agenda-setting**, di mana pihak-pihak dengan kepentingan tertentu berusaha untuk menentukan topik atau isu apa yang seharusnya mendapatkan perhatian publik. Dengan memfokuskan perhatian masyarakat pada isu-isu tertentu yang menguntungkan mereka, pihak-pihak tersebut dapat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih penting atau yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Misalnya, media dan politisi tertentu dapat menggembarkan-gemborkan isu yang tidak terlalu relevan, sementara isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, hak asasi manusia, atau masalah lingkungan hidup yang lebih mendesak justru terabaikan. Melalui agenda-setting ini, kelompok dengan kekuatan besar, baik dalam dunia bisnis, media, atau politik dapat memengaruhi opini publik dengan cara yang lebih halus dan sistematis. Mereka tidak hanya mempengaruhi apa yang dibicarakan, tetapi juga bagaimana masyarakat memandang berbagai isu. Hal ini bisa membatasi ruang bagi masyarakat untuk membahas dan memperjuangkan isu-isu yang lebih luas dan lebih signifikan (Trifanny *et al.*, n.d.).

Penyalahgunaan **data pribadi dan teknologi digital** adalah bentuk manipulasi publik yang semakin banyak digunakan dalam demokrasi modern. Dalam pemilu atau kampanye politik, data pribadi pemilih dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menyusun pesan yang sangat dipersonalisasi dan efektif untuk mempengaruhi pilihan mereka. Hal ini dikenal dengan nama *micro-targeting*. Kelompok atau partai politik dengan sumber daya lebih besar bisa menggunakan teknik ini untuk memanipulasi emosi dan preferensi individu berdasarkan data yang mereka miliki, tanpa menyadari bahwa ini bisa mengarah pada manipulasi opini dan keputusan yang kurang rasional.

## **B. Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi**

Implikasi terhadap kualitas demokrasi merujuk pada bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi baik dari faktor internal maupun eksternal berdampak pada proses dan hasil demokrasi itu sendiri (Pendidikan Transformatif *et al.*, n.d.-a). Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dari seberapa efektif demokrasi tersebut dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi politik, representasi yang adil, hak-hak individu, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks ini, beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kualitas demokrasi meliputi ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan, manipulasi informasi, polarisasi sosial, serta pengaruh kelompok kepentingan dan elit politik.

### ***Ketidaksetaraan Akses terhadap Kekuasaan***

Salah satu implikasi terbesar dari ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan adalah terjadinya distorsi dalam representasi politik. Dalam sistem demokrasi, suara setiap warga negara seharusnya memiliki bobot yang sama, namun kenyataannya sering kali kelompok-kelompok tertentu seperti elit ekonomi atau kelompok yang memiliki pengaruh politik besar dapat lebih mudah mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik. Ketidaksetaraan ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara kepentingan kelompok lain, terutama mereka yang terpinggirkan, sering kali tidak terdengar atau diabaikan. Ini mengurangi kualitas demokrasi karena kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan, melainkan hanya segmen-segmen tertentu yang memiliki kekuasaan (Afandi & Afandi, 2018).

### ***Polarisasi Politik dan Sosial***

Polarisasi politik yang semakin tajam antara kelompok-kelompok dalam masyarakat juga berdampak buruk pada kualitas demokrasi. Ketika masyarakat terpecah oleh pandangan politik yang sangat berbeda, sering kali terjadi penurunan dalam kapasitas untuk berkompromi dan dialog yang



konstruktif. Para politisi atau partai politik yang saling berseberangan mungkin lebih fokus pada mengalahkan lawan politik daripada mencari solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam situasi ini, kebijakan-kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan keharmonisan sosial, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari suatu negara demokratis. Ketegangan sosial yang timbul akibat polarisasi ini juga dapat mengarah pada ketidakstabilan politik, yang merusak kualitas demokrasi dalam jangka panjang.

### ***Manipulasi Informasi dan Disinformasi***

Manipulasi informasi, baik melalui media massa yang dikendalikan oleh kelompok tertentu maupun penyebaran berita palsu di media sosial, dapat memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Disinformasi dapat menyesatkan pemilih dan mempengaruhi pilihan politik mereka berdasarkan informasi yang tidak akurat. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang jujur dan transparan, maka proses pemilihan umum dan pembuatan kebijakan akan kehilangan legitimasinya. Ketidakpercayaan terhadap informasi yang sah dapat mengarah pada apatisme politik, di mana warga negara merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam demokrasi karena mereka merasa informasi yang mereka terima tidak dapat dipercaya.

### ***Pengaruh Elit dan Kelompok Kepentingan***

Ketergantungan yang besar terhadap elit politik dan kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan bisa mengurangi **akuntabilitas dan transparansi** dalam pemerintahan. Ketika kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan publik, maka keputusan yang diambil lebih cenderung berpihak pada kepentingan mereka daripada kepentingan rakyat banyak (2018 & 2018, n.d.). Hal ini menurunkan kualitas demokrasi, karena kebijakan tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat dan mengarah pada kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir orang yang berkuasa, daripada untuk kepentingan umum.

### ***Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Demokrasi***

Krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi demokrasi seperti lembaga legislatif, eksekutif, peradilan, dan media dapat merusak kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ketika masyarakat merasa bahwa institusi-institusi tersebut tidak dapat dipercaya atau korup, mereka cenderung untuk menurunkan partisipasi politik mereka, atau bahkan mempertanyakan legitimasi dari sistem demokrasi itu sendiri. Kepercayaan yang rendah terhadap institusi ini juga memperburuk ketidakstabilan politik, karena masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Jika kepercayaan terhadap demokrasi menurun, maka mekanisme demokrasi termasuk pemilu dan sistem checks and balances tidak akan berfungsi dengan optimal.

### ***Dampak terhadap Kualitas Demokrasi***

Secara keseluruhan, implikasi terhadap kualitas demokrasi dapat sangat merugikan keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri. Tantangan-tantangan yang disebutkan di atas tidak hanya mengancam kebebasan politik dan hak individu, tetapi juga menurunkan partisipasi politik yang sehat dan membuat masyarakat semakin teralienasi dari proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak terwakili atau kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kehendak mereka, kualitas demokrasi menurun, dan legitimasi dari sistem demokrasi pun mulai dipertanyakan. Oleh karena itu, penting untuk terus menerus memperbaiki dan mengawasi sistem

demokrasi agar tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan cara yang menjaga prinsip dasar demokrasi keadilan, keterwakilan, kebebasan, dan akuntabilitas (Rona Vinita *et al.*, 2023).

### **C. Harapan untuk Demokrasi di Masa Depan**

#### **1. Peningkatan Pendidikan Politik**

Pendidikan politik yang merata dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengedukasi publik tentang pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi dan cara menilai kebijakan publik secara kritis (Pendidikan Transformatif *et al.*, n.d.-b).

#### **2. Reformasi Sistem Pemilu**

Untuk mengurangi praktik politik uang dan korupsi, perlu ada reformasi dalam sistem pemilu. Pembatasan biaya kampanye, transparansi pendanaan politik, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik politik yang merusak demokrasi harus diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dalam pemilu juga dapat mengurangi potensi kecurangan dan manipulasi.

#### **3. Mengatasi Polarisasi Sosial**

Penguatan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan toleran harus menjadi bagian dari pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Dialog antar kelompok sosial dan politik yang berbeda perlu didorong untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mengurangi ketegangan. Sebuah demokrasi yang sehat tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi perbedaan pendapat yang konstruktif (Islam & 2013, n.d.).

#### **4. Peran Media yang Bertanggung Jawab**

Media, sebagai pilar penting dalam demokrasi, harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa media tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan menciptakan diskursus publik yang sehat.

### **KESIMPULAN**

Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, radikalisme, penyalahgunaan kebebasan berpendapat, pragmatisme politik, dan ketidaksetaraan akses informasi. Tantangan-tantangan ini berdampak negatif pada kualitas demokrasi, menciptakan politik uang yang merusak independensi calon terpilih, oligarki yang mengurangi pluralisme, serta keterbatasan partisipasi politik yang mengakibatkan representasi yang tidak merata. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat harapan untuk masa depan demokrasi yang lebih baik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, independensi peradilan, serta partisipasi publik yang lebih aktif menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi. Reformasi hukum dan pemilu juga sangat diperlukan untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih adil. Upaya pemberantasan korupsi dan pendidikan politik bagi generasi muda akan membantu membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan politik. Untuk mewujudkan harapan-harapan ini, diperlukan kerja sama yang intensif

antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang menuju arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2018, P. H.-N. K. K. R. T., & 2018, undefined. (n.d.). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*. Retrieved January 4, 2025,
- Abdurrahman, M. (2003). *Islam sebagai kritik sosial*.
- Afandi, M., & Afandi, S. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*.
- Afif, N., Ubaidillah, A., Islam, M. S.-J. P., & 2020, undefined. (n.d.). Konsep kesetaraan gender perspektif fatima mernissi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *Academia.Edu*. Retrieved January 4, 2025,
- Akbar, M., Evadiani, Y., & Asniar, I. (2021). *Public Relations*.
- Aliawati, M. (n.d.). Strategi Kampanye Politik di Media Massa Pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar Dalam Masa Kampanye Pilkada DKI 2007. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Retrieved January 4, 2025,
- Di banyak negara, (Politik uang) menjadi masalah... - Google Scholar*. (n.d.). Retrieved January 4, 2025, from
- Faulks, K. (2019). *Sosiologi Politik, Pengantar Kritis*.
- Gender, N. S.-M. J. K., & 2015, undefined. (n.d.). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Repository.Uingusdur.Ac.Id*. Retrieved January 4, 2025, from <http://repository.uingusdur.ac.id/129/>
- Gunawan, B., & Ratmono, B. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth (2021)*.
- Harefa, D., & Hulu, M. F. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Pluralisme*.
- Ilmiah dalam Bidang Pendidikan STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, J., Zuhri, S., Amalia Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UPN, D., & Jatim JIRaya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, V. (n.d.). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Ejournal.Stitalhikmah-Tt.Ac.Id*. Retrieved January 4, 2025,
- Islam, A. M.-J. P., & 2013, undefined. (n.d.). Membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam. *Core.Ac.Uk*. Retrieved January 4, 2025,
- Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke 20 hingga Era Reformasi*.
- Kirana, D., Setiawan, M., Social, S. P.-J. O. L. A., & 2024, undefined. (n.d.). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Rumah-Jurnal.Com*. Retrieved January 4, 2025,
- Komunikasi, D. H.-I. J. I., & 2018, undefined. (n.d.). Dwi fungsi media massa. *Pdfs.Semanticscholar.Org*. Retrieved January 4, 2025,
- Lismanto, L., Hukum..., Y. U.-J. P., & 2020, undefined. (n.d.). Mendasarkan instrumen hukum penyelenggaraan negara sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokratis. *Ejournal2.Undip.Ac.Id*. Retrieved January 4, 2025,
- Masyarakat, N. K.-, Sosiologi, J., & 2016, undefined. (n.d.). Dari Islamisme ke “Premanisme”: PergeseranOrientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal DiEra Desentralisasi Demokrasi. *Scholarhub.Ui.Ac.Id*. Retrieved January 4, 2025,
- Nuna, M., Marthen, R., Jurnal, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Journals.Usm.Ac.Id*, 4, 110.

- <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1652>
- Nuraliza, V., Nur Rahmadi, A., Mubaroq, A., Putri Melani, A., Ifana, A., Raya Dringu, J., Mayangan, K., Probolinggo, K., & Timur, J. (2024). Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024. *Prin.or.Id*, 4(1), 245–261. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1>
- Pendidikan Transformatif, J., Santoso, G., Abdul Karim, A., Maftuh, B., & Murod, mun. (n.d.-a). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jupetra.Org*. Retrieved January 4, 2025,
- Pendidikan Transformatif, J., Santoso, G., Abdul Karim, A., Maftuh, B., & Murod, mun. (n.d.-b). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jupetra.Org*. Retrieved January 4, 2025,
- Policy, Y. L.-J. of P. and, & 2018, undefined. (2018). Politik identitas di Indonesia: Antara nasionalisme dan agama. *Jppol.Ub.Ac.Id*, 1(1). <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>
- Politik, P. S.-K., & 2025, undefined. (n.d.). KOMUNIKASI POLITIK. *Books.Google.Com*. Retrieved January 4, 2025,
- Pramessella, M., ... N. R.-... : J. P., & 2024, undefined. (n.d.). Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres .... *Journal.Staiypiqbaubau.Ac.Id*. Retrieved January 4, 2025,
- Rona Vinita, K., Danda Evantrino, M., Berliana Budisafitri, D., & Salsabila Meiralda, K. (2023). Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal.Stikes-Ibnusina.Ac.Id*, 1, 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7954293>
- Science, I. W.-P. I. I. P., & 2017, undefined. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Journal.Unnes.Ac.Id*. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/view/8487>
- Sosiologi, U. K.-M. J. P. D. R., & 2021, undefined. (n.d.). Dampak konglomerasi media terhadap industri media massa dan demokrasi ekonomi politik di era konvergensi media. *Academia.Edu*. Retrieved January 4, 2025,
- Trifanny, R., Aulia, A., Sosial, R. A.-... : J. I., & 2024, undefined. (n.d.). PERAN MEDIA SEBAGAI AGENDA SETTING PADA PENYEBARAN PERINGATAN DARURAT. *Ejournal.Warunayama.Org*. Retrieved January 4, 2025,
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., Humanities, I. A.-A. I. S., & 2023, undefined. (n.d.). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Adshr.Org*. Retrieved January 4, 2025,
- Winarno, B. (2007). *Sistem politik Indonesia era reformasi*.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*.
- Youna Bachtiar, A., Hikmah Perkasa, D., Rizki Sadikun, M., Arjuna Utara No, J., Tomang, T., Jeruk, K., & Barat, J. (2016). Peran Media Dalam Propaganda. *Komunikologi.Esaunggul.Ac.Id*, 13, 78. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/165>